



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

KKP
2025

panganbiru
08
POVERTY
GROWTH

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

PEMANTIK DISKUSI PEGUATAN PENGELOLAAN RUMPON DI WPPNRI & LAUT LEPAS

Rapat Koordinasi
Dalam Rangka Penataan Rumpon di
WPPNRI
Jakarta 04 Juni 2025

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Rumpon di Indonesia dan RFMO

Indonesia

1

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/2021

2

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/2023

3

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7/2022

IOTC

1

Resolution 23/01 on Anchored FAD

2

Resolution 24/02 on Drifting FAD

3

Resolution 19/02 on FAD Management Plan

WCPFC

1

CMM 23/01 on BET, YFT and SKJ Tuna di WCPFC

- Pembatasan Waktu Pemanfaatan
- Jumlah yang dapat digunakan
- Desain Ramah Lingkungan
- Pemantauan, Pelaporan dan Retrieval



Peraturan Terkait Pengelolaan Rumpon

1

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/2021

- ✓ tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- ✓ Mengatur pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan rumpon dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara bertanggung jawab, meliputi:
 - a. Perizinan rumpon melalui penerbitan Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR)
 - b. Kewajiban pelaporan
 - c. Pengawasan pemanfaatan Rumpon
- ✓ Membutuhkan SKKPRL karena menetap >30 hari

2

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. No. 36/2023

- ✓ tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI di Perairan Darat
- ✓ Definisi Rumpon
- ✓ Spesifikasi teknis/Komponen Rumpon
- ✓ Norma Penempatan Rumpon
- ✓ Penandaan Rumpon

3

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7/2022

- ✓ tentang Alokasi Rumpon Pada Jalur Penangkapan Ikan III di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- ✓ Penetapan **3.443 titik lokasi penempatan** rumpon di 11 WPPNRI
- ✓ Digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan SIPR untuk rumpon menetap pada Jalur Penangkapan Ikan-III di WPPNRI

**Penyesuaian dengan UU
No. 11 Tahun 2024 Cipta
Kerja**

**Percepatan Pelayanan
Perizinan menjadi 4 hari
kerja**



Upaya yang telah dilakukan dalam Mendorong Perizinan Rumpon

1. Sosialisasi perizinan rumpon pada pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan (kerjasama dengan mitra)
2. FGD Studi Potensi Titik Lokasi Penempatan Rumpon di WPPNRI
3. Penyusunan peraturan titik lokasi penempatan rumpon

2021

2022

1. Sosialisasi Penempatan dan Pemanfaatan Rumpon di Cilacap dan Belawan
2. Webinar Rumpon (Narasumber)
3. Forum Rumpon di Bogor (kerjasama dengan mitra)
4. Diterbitkannya KepmenKP No. 7 tahun 2022 tentang Alokasi Rumpon Pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI

1. Sosialisasi perizinan dan alokasi penempatan rumpon (kerjasama dengan mitra) di Maluku, Sulawesi Selatan, Sumbawa Barat dan NTB
2. Webinar Rumpon (Narasumber)
3. Forum Rumpon di NTB (kerjasama dengan mitra)

2023

2024

1. Forum Rumpon di Bogor (kerjasama dengan mitra)
 - Menetapkan rencana aksi percepatan perizinan rumpon dengan melibatkan unit kerja dan K/L terkait
2. Berkoordinasi dengan mitra, unit kerja dan K/L terkait dalam pelaksanaan rencana aksi
3. Pelaksanaan gerai perizinan /sosialisasi/asistensi rumpon (PKKPRL dan SIPR)



Upaya yang telah dilakukan dalam Mendorong Perizinan Rumpon

1. Gerai Sosialisasi dan Perizinan SIPR di Bitung
2. Kegiatan asistensi diberikan kepada 24 pelaku usaha yang terdiri dari 12 perusahaan dan koperasi perikanan serta 12 perusahaan perorangan yang bermaksud mengajukan permohonan PKKPRL dan SIPR.

1-2 Okt 2024

15-17 Okt 2024

1. Sosialisasi dan Asistensi SIPR di Bali
2. Sosialisasi diikuti 30 peserta. Kegiatan asistensi diikuti 23 (dua puluh tiga) pelaku usaha yang terdiri dari 18 (delapan belas) perusahaan perikanan dan 5 (lima) perusahaan perorangan yang bermaksud mengajukan permohonan PKKPRL dan SIPR

1. Sosialisasi dan Asistensi SIPR di PPS Cilacap
2. Sosialisasi diikuti 40 peserta. Asistensi diikuti 24 pelaku usaha yang terdiri dari 12 (dua belas) perusahaan dan koperasi perikanan serta 12 perusahaan perorangan yang akan mengajukan PKKPRL dan SIPR

4-5 Des 2024

SIPR s/d Mei 2025

No	WPP SIPR	Jumlah Terbit	Keterangan	Catatan
1	573	12	Izin terbit masih berlaku	1. Terdapat 7 SIPR yang sudah habis masa berlaku di tahun 2024 2. Terdapat 18 SIPR yang masih memiliki izin terbit 2025
2	715	7	Izin terbit tidak berlaku	
3	717	5	Izin terbit masih berlaku	
4	718	1	Izin terbit masih berlaku	
Total		25		



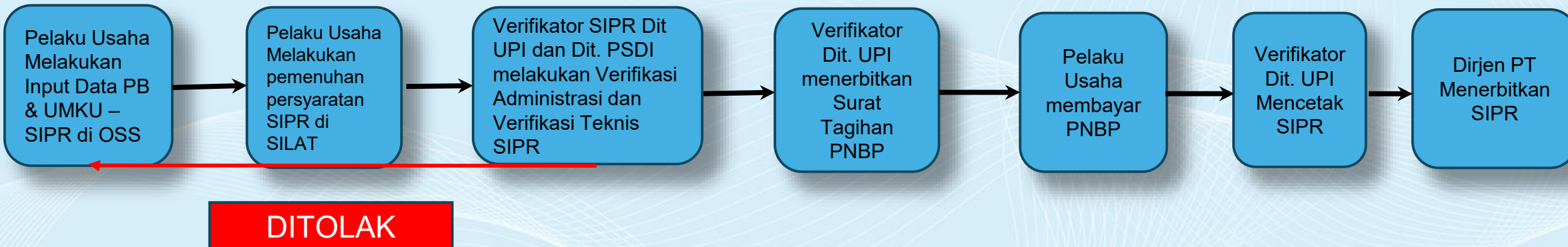
Alur Proses SIPR dari OSS - SILAT

Persyaratan SIPR Untuk **Non Nelayan Kecil** untuk mendapatkan SIPR baru, menyampaikan permohonan untuk mendapatkan SIPR baru dengan ketentuan:

1. Nomor Surat Izin Usahan Penangkapan Ikan
2. Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang akan memanfaatkan rumpon.
3. Surat Permohonan mendapatkan SIPR
4. SKKPRL - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
5. Rencana pemanfaatan Rumpon, yang memuat:
 - (1) jumlah Rumpon
 - (2) spesifikasi teknis setiap Rumpon
 - (3) koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur)
 - (4) Alat Penangkapan Ikan
 - (5) estimasi frekuensi pemanfaatan
 - (6) estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram
6. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi
7. Surat Pernyataan Kesanggupan

Persyaratan SIPR untuk **Nelayan Kecil** untuk mendapatkan SIPR baru, menyampaikan permohonan untuk mendapatkan SIPR baru dengan ketentuan:

- 1) NIB Kelompok Usaha Bersama atau Koperasi;
- 2) Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang akan memanfaatkan rumpon.
- 3) Surat Permohonan mendapatkan SIPR
- 4) SKKPRL - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
- 5) rencana pemanfaatan Rumpon, yang memuat:
 - (1) jumlah Rumpon
 - (2) spesifikasi teknis setiap Rumpon
 - (3) koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur)
 - (4) Alat Penangkapan Ikan
 - (5) estimasi frekuensi pemanfaatan
 - (6) estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram
6. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi
7. Surat Pernyataan Kesanggupan





Quo Vadis?

Berapa jumlah rumpon aktif?
Berapa kapal pakai rumpon?
Kenapa SIPR sedikit?
Kenapa SKKPRL lama?
Kenapa terus melanggar?

Apa rumpon perlu dibatasi?
Apa kapal perlu dibatasi?
Apa sulitnya SIPR?
Apa sulitnya SPPKRL?
Apa kendala rumpon lainnya?





Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

Terimakasih dan Selamat Berdiskusi


Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap


 Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

 kkp.go.id

 [@kkpgoid](https://www.instagram.com/kkpgoid)

 [@kkpgoid](https://twitter.com/kkpgoid)

 [kkp.go.id](https://www.tiktok.com/kkp.go.id)

 KKPPodcast

 141